

PEMILU 2009 DAN PERLAWANAN PEREMPUAN

Kekhawatiran bahwa calon legislatif perempuan bakal tersungkur dalam pemilu 2009 mewarnai pemberitaan media cetak maupun elektronik. Ini dipicu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008.

Kenyataannya, jika MK tidak membatalkan mekanisme pemilihan calon menggunakan sistem nomor urut, perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR jumlahnya tidak jauh berbeda dari hasil Pemilu 2004.

Seperti dirilis oleh KPU per 31 Oktober 2008, perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPR Pemilu 2009 adalah 3.910 orang, hanya 12,7% menduduki nomor urut satu, 19,46% di nomor urut dua, dan 25,93% di nomor urut tiga; selebihnya berada di nomor urut enam dan sembilan. Dalam DCT DPR Pemilu 2004, 9,7% perempuan berada di nomor satu dan 16,8% di nomor dua; terpilih 11,8% dari keseluruhan 550 anggota DPR.

Enggan Berpolitik

Kondisi tersebut mengerucut pada kesimpulan bahwa ketersediaan calon legislatif perempuan memang kurang. Beberapa fakta pun mendukung keengganan kaum hawa berpolitik praktis. Caleg perempuan yang dicalonkan parpol lebih banyak menjadi pelengkap untuk memenuhi kuota 30%. Terkadang, yang dicalonkan isteri atau anak perempuannya sendiri.

Selain itu, banyak faktor bergumul dalam keengganan perempuan berpolitik di Indonesia. Sebagian besar masih beranggapan kalau politik bukan dunianya. Budaya patriarki juga membuat perempuan malas terjun di politik.

Politik masih identik dengan dunia maskulin (kaum pria).

Parahnya lagi, jika sebagian caleg perempuan terpilih belum teruji komitmendankepeduliannyaterhadapnasibkaumnya. Padahalasumsinya,hanya perempuan yang peduli terhadap perempuanlah yang akan bisa memperjuangkan aspirasimereka.

Penelitian terhadap 825 remaja usia 16-23 tahun yang terdiri dari siswa SMA kelas XII dan mahasiswa di kota Semarang yang dilakukan penulis rupanya sejalan dengan keengganan perempuan Indonesia terjun di bidang politik. Tidak satupun responden, baik laki-laki maupun perempuan dalam penelitian pada Maret-Oktober 2008 tersebut, bercita-cita menjadi politikus atau menduduki jabatan berbau politik. Padahal, tak ubahnya PNS, dokter, guru, pengusaha, ataupunakuntan,menjadipolitikusjugasuapilihankarier.

Kenyataan ini tampaknya masih sejalan dengan hasil survey Majalah *Tempo* pada tahun 1988 terhadap 944 responden berusia 20-25 tahun di 12 kota besar di Jawa dan Luar Jawa. Sebanyak 60,38% mengaku tertarik kepada masalah politik, tetapi tidak mau terjun langsung. Bahkan, 16,41% menyatakan tidak berminat sama sekali pada politik. Sementara, 10,8% menyatakan buta politik. Hanya 11,86% yang ingin aktif dalam kegiatan politik. Ternyata, belum ada perubahan berarti dalam kegairahan remaja berpolitik setelah nyaris empat kali Pemilu (1988-2008).

Padahal, semakin banyak responden melakukan eksplorasi dan berkomitmen dalam beragam domain kehidupannya, termasuk karier, politik, agama, gaya hidup, peran jenis kelamin, maka semakin tinggi keyakinannya dalam mengambil keputusan karier.

Sementara komitmen yang dibuat tanpa adanya eksplorasi, tidak berpengaruh terhadap keyakinan responden mengambil keputusan karier. Malah, menjadikannya gamang pada pilihan yang *pseudocrystallized* (terkristal secara semu). Ini menandakan bahwa keputusan karier tidak bisa dibuat *sakdeksaknyet* .

Sulit dibayangkan, ketika seseorang lulus kuliah, tiba-tiba dicalonkan menjadi anggota DPR. Sementara, dia tidak pernah mengeksplorasi seluruh aspek baik positif dan negatif dari jalur karier yang akan di tapakinya. Seperti bagaimana bernegosiasi secara apik, *tepa slira* terhadap keberagaman, menentukan skala prioritas. Termasuk jika ada *money politics* , kolusi, fenomena 'tidak ada kawan ataulawan abadi', bahkan resiko tersandung masalah hukum.

Eksplorasi Karier

Implikasinya, ketika diinginkan regenerasi terencana adalah bidang politik, kesempatan melakukan eksplorasi terhadap karir politik sebaiknya dimulai sejak periode fantasi karier (baca: taman kanak-kanak). Bukan sekedar penjarangan caleg berkualitas beberapa bulan sebelum pemilu.

Eksplorasi karir ini akan lebih baik jika terintegrasi dalam pendidikan formal dan kehidupan bermasyarakat. Para remaja perempuan khususnya, membutuhkan *role model* perempuan yang berhasil menekuni bidang politik. Media massa, seperti televisi dapat membantu menyuguhkan paparan ini, bukan hanya menampilkan sinetron-sinetron sarat konflik keluarga.

Kemudian para remaja masa kini juga membutuhkan dorongan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Mereka butuh jaminan rasa aman ketika bercita-cita menjadi politikus.

Yang terpenting, mereka membutuhkan pengalaman berhasil (*performance*

accomplishment) yang misalnya dapat diperoleh dari kesempatan berorganisasi, menjadi ketua dan pengurus kelas. Dari situ, mereka akan dihadapkan pada bagaimana mengatasi perbedaan, mempertahankan pendapat, melakukan persuasi, menerapkan empati, juga menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan.

Pengalaman berharga tersebut tidak mungkin diperoleh secara instan setelah melewati masa remajanya. Paparan, dukungan, dan pengalaman berhasil yang diperoleh dari eksplorasi merupakan kunci terbentuknya jalur karier. Sehingga ketika seseorang merasa nyaman pada saat berkecimpung dalam dunia kerjanya, berarti bidang tersebut sesuai untuknya.

Para peneliti vokasional telah banyak membuktikan bahwa kenyamanan seseorang dalam karirnya akan mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya, yang pada akhirnya berimplikasi pada kualitas kinerja dalam jalur karier yang dipilihnya tersebut.

Pastinya, perlawanan perempuan bukan sekedar mengakhiri dominasi laki-laki atau jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Proses pendidikan karir politik berkesinambungan tampaknya lebih diperlukan para remaja perempuan agar siap terjun di politik praktis demi aspirasi kaumnya untuk kemajuan bangsa.

Diperlukan kesadaran masyarakat, orang tua, sekolah, universitas, guru, dosen, media massa, institusi agama dan rohaniwan, parsuami, dan parpol untuk mendukung pendidikan karir politik perempuan. Selamat berjuang!

Dian Ratna Sawitri
Peneliti Perkembangan Karier Remaja dan Staf Pengajar Fakultas Psikologi
Universitas Diponegoro Semarang